

# **BAB 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung menjadi perhatian utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat (Mahdur & Sulistiadi, 2020). Kondisi seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung menjadi faktor utama yang menyebabkan masalah kesehatan dan angka kematian di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah telah meluncurkan beragam inisiatif kesehatan pencegahan, salah satunya adalah Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) untuk Penyakit Tidak Menular, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi awal dan pencegahan penyakit tidak menular (Mahdur & Sulistiadi, 2020).

Posbindu PTM merupakan program berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemeriksaan kesehatan rutin serta menurunkan angka kejadian PTM. Agar program ini dapat berjalan secara optimal, dukungan dari pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai menjadi faktor penting. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan fasilitas, mengalokasikan anggaran, serta mengoordinasikan tenaga kesehatan dan kader Posbindu agar pelayanan dapat berjalan secara efektif (Indriani et al., 2018).

Selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun, program ini mencoba kembali aktif sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Implementasi program ini dirasa masih membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, fasilitas

kesehatan, serta partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Posbindu. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dibutuhkan untuk mendukung program ini agar mengurangi pencegahan penyakit tidak menular dan deteksi dini (Hamira, Arafat, 2024).

Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di bidang kesehatan, mencakup tempat pelaksanaan program, alat kesehatan, dan pengawasan program. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran, mengorganisir tenaga kesehatan, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan Posbindu. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya secara optimal (Inayati & Nuraini, 2021)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menggunakan Dana Desa dalam mendukung program kesehatan masyarakat, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana Posbindu. Hal ini memperkuat peran desa sebagai unit pemerintahan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan layanan kesehatan di tingkat lokal. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular menegaskan pentingnya Posbindu sebagai sarana utama dalam mendukung kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi UU Desa telah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa dalam mengembangkan program pelayanan kesehatan berbasis komunitas, seperti Posyandu dan Posbindu. Pemerintah desa berperan dalam penyusunan kebijakan lokal, penganggaran, hingga pengawasan kegiatan layanan kesehatan masyarakat, sehingga memperkuat

pentingnya peran desa dalam mendukung pelayanan kesehatan yang partisipatif dan berkelanjutan (Suharto, 2021).

Pemberdayaan masyarakat melalui Posbindu tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan kesadaran kesehatan, tetapi juga dalam memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pemeriksaan kesehatan masyarakat. Program ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam deteksi dini penyakit dan pemantauan faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). Hal ini sejalan dengan pendekatan kesehatan berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi aktif masyarakat serta penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai (LENI, 2024).

Keberhasilan Posbindu sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi tempat pelaksanaan, alat kesehatan seperti tensimeter dan alat cek gula darah, serta pendanaan bagi kader Posbindu dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan program dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dengan adanya dukungan infrastruktur seperti tempat pelayanan yang layak, alat kesehatan yang mencukupi, serta koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan tenaga kesehatan, program Posbindu akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi aspek-aspek tersebut menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Posbindu di masyarakat (Putri et al., 2018). Namun, di beberapa daerah, kurangnya fasilitas kesehatan serta keterbatasan jumlah tenaga medis dan kader Posbindu menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini (Alendra et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif

pemerintah desa dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang mendukung kegiatan Posbindu, serta menjalin sinergi dengan tenaga kesehatan dan masyarakat agar program ini dapat berjalan secara optimal.

Salah satu strategi peningkatan efektivitas program Posbindu adalah dengan penguatan sarana dan prasarana berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan data kesehatan masyarakat serta komunikasi yang lebih efektif antara kader Posbindu dan tenaga kesehatan (Rahajeng & Wahidin, 2020). Digitalisasi layanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi pemantauan kesehatan masyarakat serta mempercepat respons terhadap kondisi yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

Selain dukungan teknologi, keberhasilan program Posbindu juga dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh masyarakat dan dukungan keluarga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat cenderung lebih aktif mengikuti program kesehatan apabila mendapatkan dorongan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan promosi kesehatan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas Posbindu (Sicilia et al., 2018).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas efektivitas program Posbindu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit tidak menular (Umayana & Cahyati, 2015), serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posbindu (Sicilia et al., 2018). Selain itu, penelitian lain juga menyoroti peran tenaga kesehatan dan kader Posbindu dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat (Alendra et al., 2024). Namun, penelitian-penelitian

tersebut belum secara spesifik menyoroti bagaimana pemerintah desa memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung keberlanjutan program Posbindu.

Sebagian besar penelitian yang ada lebih berfokus pada peran masyarakat, tenaga kesehatan, dan efektivitas program, tetapi belum banyak yang membahas peran pemerintah desa dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi Posbindu. Selain itu, belum ada penelitian yang secara mendalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan sarana dan prasarana Posbindu serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran pemerintah desa dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan untuk program Posbindu di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas kesehatan serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Posbindu di tingkat desa.

Dengan adanya program Posbindu PTM, diharapkan masyarakat, khususnya lansia, dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah diakses dan berkelanjutan. Efektivitas program ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk ketersediaan tempat, alat kesehatan, serta dukungan bagi kader dan tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran pemerintah desa dalam

memastikan kelangsungan program Posbindu PTM di Desa Dlanggu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat berbasis komunitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana peran pemerintah desa dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan dalam pelaksanaan program Posbindu di Desa Dlanggu kecamatan Dlanggu tahun 2025 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan menghubungkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu : Menganalisis peran pemerintah desa dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan dalam pelaksanaan program Posbindu di Desa Dlanggu kecamatan Dlanggu tahun 2025.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- Menambah wawasan akademik mengenai peran pemerintah desa dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam implementasi program Posbindu.

- Memberikan kontribusi terhadap penelitian sebelumnya dengan mengisi kesenjangan penelitian terkait kebijakan desa dalam mendukung keberlanjutan Posbindu.

## 2. Manfaat Praktis

- Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Posbindu.
- Membantu tenaga kesehatan dan kader dalam memahami kendala dan solusi dalam implementasi Posbindu.
- Menjadi referensi bagi desa lain dalam mengembangkan kebijakan dan program kesehatan berbasis masyarakat.

### **1.5 Batasan Penelitian**

#### 1. Batasan Lokasi

- Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan karakteristik berbeda.

#### 2. Batasan Subjek

- Fokus penelitian ini adalah pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posbindu, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program Posbindu di Desa Dlanggu.

#### 3. Batasan Waktu

- Data penelitian dikumpulkan dalam periode tertentu yang ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh hanya berlaku dalam konteks waktu tersebut.

#### 4. Batasan Variabel

- Penelitian ini hanya membahas peran pemerintah desa dalam program Posbindu, tanpa menganalisis aspek klinis atau medis dari penyakit yang ditangani di Posbindu.